

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.57
- Beniharmoni Harefa dan Abdul Kholid, *Hukum Pidana*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2024, hlm. 35.
- Chazawi Adami/ Ferdian Ardi, “*Tindak Pidana Pemalsuan*”, jilid ke-2, Kota Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.2
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.
- Gerson W. Bawengan, “*Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm.11
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Bandung : Maju Mundur, 2007, hlm. 22
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 32
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, “*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 101
- Leden Marpaung, “*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*”, Edisi Kedua Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.12

- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 4
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju: hal 127
- Muhammad Helmi, *Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln*, June 2021, Volume 16 Nomor 1, hlm 55M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penrapan KUHAPl*, 2005, Sinar Grafika, hal 358
- P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cet. Kedua, 1983, hal. 150.
- Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hal Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan 1995 hlm. 36
- R. Soesilo, 1995, “*KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Bogor, Politeia, hlm. 183
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 13-14
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 126-127
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1967, hal. 166.
- Yanto Melkianus P. Ekon, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*

SUMBER JURNAL

Aldi Indra Tambuwun, “Saksi terhadap Sanksi yang memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No.6 (Juli 2016), hlm. 35

Edi Suranta Sinulingga, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 Issue 1, (January2023). Hlm 39

Geofani Turambi, Theodorus H. W. Lumunon,Vonny A. Wongkar, “Wewenang Hakim dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IX,No. 5, April 2021

Gerald Majampoh, “Kesaksian Palsu didepan Pengadilan dan Proses Penanganannya”, *Lex Crimen*, Vol.II, No.1,Januari-Maret 2013, hlm. 129-130

Hakim. (n.d.) *Tinjauan Yuridis Tindak pidana Memberikan Keteraangan Palsu Di Laporaan Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid. B/2019/PN*

Suryawan, I. M. F., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 45-50.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana

PUTUSAN-PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

Nomor 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu

Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sdn

Nomor 353 /Pid.B/2022/PN Pb